

# Inovasi

## Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen

ISSN : 0216 – 7786  
Volume/No : 6/2, Juli 2010

---

Syarifah Hidayah	<i>Analisis Kepuasan Pelanggan pada PT. Telkom di Balikpapan</i>
Priyagus	<i>Manfaat Perdagangan Internasional; Analisis Grafik dan Matematik</i>
Jiuhardi	<i>Elastisitas Penyerapan tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur</i>
Ardi Paminto	<i>Komite Audit Memodifikasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan</i>
Muhammad Ikbal	<i>Association of Top Management Involvement and Balanced Scorecard Adoption, Centralization as a Moderator</i>
Muliati	<i>Determinan Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia</i>
Juliansyah Roy	<i>Pengaruh Pengeluaran Pembangunan dan Tingkat Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur</i>
Siti Amalia	<i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Kota Samarinda</i>

---



Diterbitkan oleh:  
Program Magister Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman  
Gedung Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman  
Jl. Tn. Grogot No. 1 Gn. Kelua Samarinda.  
Telp. (0541) 749067

## PENGARUH PENGELUARAN PEMBANGUNAN DAN TINGKAT BUNGA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN TIMUR

Juliansyah Roy

Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman

*jlnsyh\_roy@yahoo.com*

### *Abstract*

*This research aimed to find out (1) the influence interest rate on investment in East Kalimantan, (2) the influence of development expenditure on investment in East Kalimantan. This research was executed in Province of East Kalimantan. Method applied in this research is multiple regression model by using data time series from the year 1987 - 2006 then data in analysis with computer program SPSS ver. 15.*

*Result of research indicates that (1) interest rate influential not significant on economic growth in East Kalimantan, (2) development expenditure of influential positive and significant on economic growth in East Kalimantan.*

**Keywords:** *Interest rate, government expenditure and economic growth.*

### **I. Pendahuluan**

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh negara berkembang difokuskan pada pembangunan ekonomi, karena yang paling terasa adalah permasalahan keterbelakangan ekonomi, dan pembangunan dalam bidang ekonomi dapat menunjang tercapainya tujuan atau sasaran dalam mendorong perubahan-perubahan dan pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perhatian terhadap pembangunan ekonomi saja tidak akan memberikan jaminan dalam suatu proses pembangunan nasional yang stabil dan terus menerus, oleh karena itu pembangunan juga dimaksudkan bagaimana cara meningkatkan pendapatan perkapita dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perekonomian mengalami pertumbuhan jika produksi berbagai sektor ekonomi lebih tinggi dari pada hasil yang dicapai pada periode sebelumnya, artinya bahwa laju pertumbuhan ekonomi daerah tergantung pada produksi sebelumnya, disamping itu keterkaitan antar sektor ekonomi dalam hal ini tingkat bunga dan pengeluaran pembangunan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan yang dilakukan dalam bentuk perubahan-perubahan yang terencana dalam berbagai aspek dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki baik itu sumberdaya manusia, sumberdaya alam maupun kelembagaan yang telah ada maupun yang akan datang dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, maka pemerintah berupaya menempuh berbagai kebijakan melalui strategi pembangunan baik secara sektoral maupun regional melalui pengeluaran pemerintah dalam hal ini pengeluaran pembangunan.

Pembangunan ekonomi yang telah berlangsung cukup lama di Indonesia menuntut berbagai prasyarat untuk mencapai keberhasilannya. Salah satunya adalah keterlibatan sektor moneter dan perbankan, yang merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan tersebut. Bahkan sebagian masyarakat sering berharap terlampau banyak dari sektor moneter dan perbankan dalam memecahkan berbagai masalah ekonomi, termasuk masalah yang timbul dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia dewasa ini. Disatu sisi hal ini dapat dipahami mengingat sektor moneter dan perbankan memang mempunyai fungsi yang mampu memberi pelayanan pada bekerjanya sektor riil, baik kegiatan investasi, produksi, distribusi maupun konsumsi.

Akan halnya dengan propinsi Kalimantan Timur, PDRB Kalimantan Timur dari tahun 2001 sampai dengan 2004 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2000 PDRB Kalimantan Timur dengan Migas sebesar Rp. 86, 348 Triliun meningkat menjadi Rp. 93,735 Triliun pada tahun 2005. Akan tetapi, meskipun PDRB Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Kalimantan Timur masih sangat tergantung dengan sektor Migas dan Pertambangan hal ini akan berimplikasi pada kebijakan dalam investasi dimana kebijakan investasi Kalimantan Timur lebih mengarah pada sektor Pertambangan dan Migas baik melalui penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri mengingat potensi Tambang dan Migas Kalimantan Timur sangat besar.

Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur relatif berfluktuasi dimana pada tahun 2001 pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur dengan migas sebesar 4,47 % dan pada tahun 2002, 2003 dan 2004 mengalami penurunan menjadi sebesar 1,74 %, 1, 86 dan 1, 79 %, hal ini menandakan bahwa ada pergeseran perekonomian yang selama ini didominasi oleh sektor pertambangan dan Migas, komposisi PDRB telah mengalami bergeser seperti industri, pertanian dan lain sebagainya yang lebih mengandalkan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB tanpa Migas lebih tinggi dibandingkan dengan laju PDRB tanpa Migas, seperti terlihat pada gambar diatas. Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur tanpa Migas cukup tinggi yaitu pada tahun 2001 sebesar 7,28 % meningkat menjadi 7,93 % pada tahun 2006.

Atas dasar hal tersebut maka dipandang perlu melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat bunga dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah "apakah tingkat bunga dan pengeluaran pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur".

## II. Kajian Teoritis dan Hipotesis

Secara teori, tingkat bunga yang tinggi akan berdampak pada menurunnya investasi, tetapi disisi lain tingkat bunga yang tinggi diharapkan akan menaikkan tingkat tabungan masyarakat dan ini pada akhirnya akan digunakan pihak bank untuk dialirkan dalam bentuk kredit. Kredit tersebut kemudian digunakan oleh para pengusaha untuk melakukan kegiatan ekonomi, menghasilkan barang dan jasa sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

*Interest rate* atau bunga uang adalah variabel ekonomi yang mempunyai pengaruh besar terhadap variabel ekonomi lainnya. Seperti dalam pasar saham di mana keputusan untuk membeli dan menjual sangat terpengaruh dengan keputusan bank central untuk menaikkan atau menurunkan tingkat bunga, selain itu dalam tingkat perusahaan ataupun rumah tangga dan pemerintah keputusan untuk meminjam juga sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga ini.

Pengaruh tingkat bunga terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat dijelaskan menurut Keynesian dalam analisis keseimbangan pada pasar barang (IS) dan pasar uang (LM) dimana pasar barang dan uang berinteraksi untuk menentukan keseimbangan yang akan berlaku dalam perekonomian. Keseimbangan pendapatan nasional tercapai apabila sifat hubungan diantara suku bunga dipasar barang sama dengan dipasar uang. Ketika suku bunga tinggi maka tingkat investasi akan rendah sehingga perubahan dalam investasi akan menimbulkan perubahan dalam perbelanjaan agregat (*aggregate expenditure*) dan keseimbangan pendapatan nasional. (Sukirno, 2005) dengan kata lain semakin tinggi rendah tingkat bunga maka pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi) akan meningkat sebaliknya apabila tingkat bunga tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan turun atau terjadi hubungan yang negatif antara tingkat bunga dan pertumbuhan ekonomi.

Suku bunga juga merupakan instrumen konvensional untuk mengendalikan atau menekan laju pertumbuhan tingkat inflasi. Adanya kenaikan suku bunga yang tinggi akan mendorong orang untuk menanamkan dananya di bank dari pada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang beresiko jauh lebih besar jika dibandingkan dengan menanamkan di bank terutama dalam bentuk deposito. Suku bunga yang tinggi menyedot jumlah uang beredar di masyarakat. Namun di sisi lain, tingginya suku bunga akan meningkatkan nilai uang selain menyebabkan besarnya *opportunity cost* pada sektor industri atau sektor riil. Dengan demikian tingkat inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku bunga yang dalam hal ini merupakan tugas dari Bank Indonesia (Bank Sentral).

Seperti Indonesia melalui Bank Indonesia dan otoritas moneter, instrumen lainnya yang dipakai adalah Simpanan Wajib Minimum seperti Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank-bank komersil. Namun dalam kenyataannya, bank sentral dan otoritas moneter tidak sepenuhnya dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga guna menekan laju pertumbuhan inflasi. Memang usaha bank sentral dan otoritas moneter untuk meredam laju inflasi dengan kebijakan suku bunga ternyata kurang efektif. Bahkan tingkat suku bunga yang tinggi di dalam negeri mematikan sektor industri, mendorong meningkatnya hutang luar negeri dan mendorong terjadinya eksodus modal ke luar negeri yang dinilai para pelaku jauh lebih aman.

Pengeluaran pemerintah (*government spending*, G) merupakan pengeluaran terbesar dari 1 unit ekonomi. Biasanya mencapai 20 persen dari PDB. Pengeluaran ini dibiayai dari penerimaan berupa pajak. Jika pajak lebih kecil dari pengeluaran maka berarti anggaran pemerintah mengalami defisit atau pemerintah memiliki hutang (Herlambang, dkk, 2002). Untuk Indonesia pengeluaran dan penerimaan tercermin dalam APBD.

Menurut Samuelson (1992) bahwa belanja negara atau pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional misalnya pembelian persenjataan, pembangunan jalan, bendungan dan gaji pegawai negeri. Pengeluaran pemerintah merupakan penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, sehingga juga merupakan penentu GDP.

Menurut Wagner (Goode, 1990) bahwa kegiatan dan pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat merupakan sosok negara maju, demikian pula kegiatan pemerintah pada berbagai tingkat (di Indonesia pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan) meningkat secara intensif dan ekstensif. Ada beberapa faktor sebagai penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah antara lain substitusi antara

kegiatan swasta dengan pemerintah. Kebutuhan pengaturan dan perlindungan oleh pemerintah yang semakin meningkat akibat semakin kompleksnya hubungan hukum dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pembagian kerja dan industrialisasi, urbanisasi dan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan anggota masyarakat terutama yang berhubungan dengan redistribusi pendapatan. Selain itu, perubahan teknologi yang tidak dapat dihindari dan peningkatan skala investasi dalam berbagai kegiatan ekonomi swasta yang menimbulkan monopoli sehingga memerlukan intervensi pemerintah.

Menurut Lyn (1982) pengeluaran pemerintah di negara-negara sedang berkembang, sangat berkembang yang ditentukan oleh penerimaannya, baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Ketidakstabilan tersebut akan menambah kompleksitas manajemen fiskal dan menyebabkan perencanaan pembangunan menjadi tidak efektif. Hal ini akan mengurangi kepercayaan dunia usaha dan menyebabkan tingkat investasi menurun dan pada akhirnya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

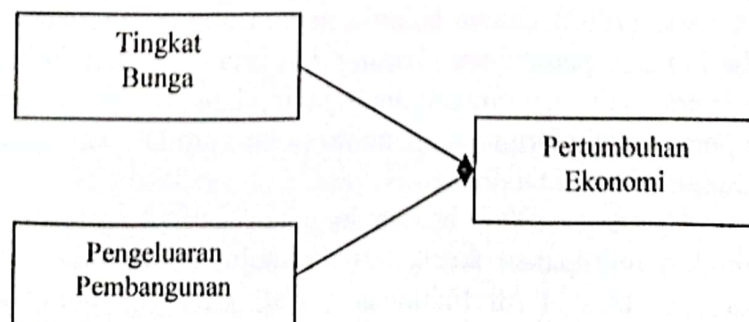
Secara teoritis, Ram (1986) mengungkapkan bahwa dalam hal penentuan besarnya peranan sektor pemerintah dan sektor swasta terdapat dua kelompok teori yang memberikan tanggapan yang kontradiktif. Secara teoritis menurut salah satu pendapat ekstrim menyatakan bahwa peranan pemerintah yang lebih besar dapat mengganggu efisiensi dan pertumbuhan ekonomi karena

- a) Operasi pemerintah sering dikelola secara tidak efisien.
- b) Proses pengaturan (*regulasi*) menimbulkan beban dan biaya terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan.
- c) Kebijakan fiskal dan moneter cenderung menimbulkan penyimpangan dengan mengganggu *insentif* ekonomi dan menurunkan *produktivitas*
- d) ekonomi.

Sebaliknya, suatu pandangan ekstrim lainnya dikemukakan oleh Landau (1983) bahwa sektor pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam proses pembangunan, dengan menganggap bahwa peranan pemerintah yang besar akan menjadi mesin pendorong bagi pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*). Dasar pemikiran ini antara lain:

- a) Peranan pemerintah dalam menyelaraskan perbedaan antara kepentingan swasta dan kepentingan sosial.
- b) Mencegah eksploitasi pihak luar negeri terhadap negara.
- c) Menjaga dan meningkatkan produktivitas investasi dan menetapkan target pertumbuhan dan pembangunan optimal yang dapat diterima masyarakat.

Pengaruh tingkat bunga dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur secara sederhana dapat dilihat pada kerangka pikir penelitian (gambar 1).



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

**Hipotesis**

Atas dasar permasalahan yang telah dikemukakan maka hipotesis dalam penelitian ini adalah "Tingkat Bunga dan Pengeluaran Pembangunan berpengaruh Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur"

**III. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Timur dengan menggunakan data *time series* dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2006. berdasarkan kerangka konseptual dan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, pengaruh antar variabel dapat dinyatakan:

$$Y = f(i,G)$$

Pengaruh tersebut kemudian diandaikan mengikuti fungsi *non linear* fungsi *Cobb Douglass*

$$Y = AG^{\alpha_2} e^{\alpha_1 i + \epsilon} \dots\dots\dots (1)$$

Persamaan (1) dilinearkan menjadi:

$$LnY = LnA + \alpha_1 i + \alpha_2 LnG \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

- Y = Pertumbuhan ekonomi (PDRB)
- i = Tingkat bunga.
- G = Pengeluaran pembangunan
- e = Logaritma natural

**IV. Analisis dan Pembahasan**

Kebijakan moneter di Indonesia mempunyai sasaran ganda, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, (2) penyediaan lapangan kerja yang cukup, (3) laju inflasi yang rendah dan (4) neraca pembayaran yang mantap. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sulit bagi bank sentral untuk mencapai seluruh target tersebut dalam waktu yang sama karena adanya "conflicting target" antara satu sasaran dengan sasaran lainnya.

Atas dasar itu, kebijakan tingkat bunga juga akan mempengaruhi kegiatan ekonomi di daerah terutama Provinsi Kalimantan Timur terutama tingkat bunga kredit/pinjaman dimana naik turunnya tingkat suku bunga kredit ini juga akan mempengaruhi perilaku investor yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa tingkat bunga investasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 23, 49 % dimana seperti kita ketahui pada tahun tersebut merupakan awal terjadinya krisis moneter di Indonesia yang kemudian mengarah kepada krisis ekonomi, tingginya tingkat bunga tersebut merupakan kebijakan untuk mengurangi aktivitas ekonomi (inflasi) ditengah rendahnya daya beli masyarakat.

Tabel 1.  
Tingkat Bunga Kredit Tahun 1987 – 2006 (dalam persen)

Tahun	Tingkat Bunga Kredit		
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
1	2	3	4
1987	22.10	19.00	
1988	22.30	19.70	
1989	21.00	19.30	
1990	20.51	19.08	
1991	25.85	21.18	
1993	19.89	17.09	
1994	17.17	14.95	
1995	18.95	15.82	
1996	19.18	16.42	
1997	21.06	17.95	
1998	33.02	23.49	
1999	26.43	21.60	
2000	18.11	16.78	
2001	18.65	17.26	21.69
2002	18.86	18.03	22.14
2003	16.66	16.81	20.97
2004	13.98	14.54	19.02
2005	14.35	14.39	18.86
2006	15.92	15.72	19.43

Sumber: Bank Indonesia Cabang Samarinda.

Kemudian pada periode berikutnya tingkat bunga kredit investasi cenderung turun sebagai refleksi dari semakin membaiknya kondisi perekonomian didalam negeri atas dasar itu diperlukan sejumlah investasi untuk memulihkan perekonomian.

Penerimaan pendapatan daerah secara garis besar dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin ditujukan untuk membiayai operasional pengelolaan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sedangkan pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Selama kurun waktu 1987 sampai dengan 2006 penyediaan belanja rutin terus mengalami peningkatan (lihat Tabel 2) seperti pada tahun 1987 pengeluaran rutin sebesar Rp. 42, 640 miliar meningkat menjadi Rp. 339, 329 miliar pada tahun 1999 serta menjadi Rp. 567, 195 miliar pada tahun 2006, peningkatan ini merupakan implikasi dari meningkatnya kegiatan penyelenggaraan pemerintah terutama pada tahun 2001-2006, dengan diberlakukannya Undang Undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 maka dimulailah babak baru pemerintahan di Indonesia yaitu dengan diberikannya kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tujuan agar pembangunan dapat langsung pada sasarannya yaitu kesejahteraan masyarakat di daerah.

Tabel 2.  
 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1987 – 2006 (dalam Ribuan Rupiah).

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	
		Rutin	Pembangunan
1	2	3	4
1987	64,398,389.90	42,640,120.60	15,730,190.32
1988	78,254,908.70	47,673,863.60	20,208,125.27
1989	100,661,617.00	56,371,047.40	61,115,978.22
1990	141,361,355.80	64,474,770.00	69,729,740.26
1991	173,086,469.00	81,098,840.00	100,329,416.08
1992	202,773,107.00	101,332,388.00	108,635,432.74
1993	217,745,761.00	68,634,508.00	153,274,826.32
1994	246,684,958.00	103,092,700.00	153,934,005.68
1995	266,715,346.00	122,646,469.00	193,935,164.14
1996	290,275,052.00	135,771,159.00	208,552,247.92
1997	305,012,143.00	157,823,687.00	137,103,097.00
1998	394,097,035.00	205,844,629.00	112,372,540.00
1999	574,368,699.00	339,329,304.00	192,689,080.00
2000	605,517,348.00	298,221,940.00	223,101,010.00
2001	1,818,526,000.00	661,225,160.00	712,447,840.00
2002	2,422,117,000.00	642,831,620.00	1,082,709,400.00
2003	3,070,490,850.00	565,537,074.00	1,495,545,000.00
2004	3,110,291,324.00	575,447,019.00	1,694,387,206.12
2005	3,736,273,749.00	526,164,200.39	2,132,459,636.12
2006	4,080,360,911.00	567,195,549.72	2,539,695,910.59

Sumber: Biro Keuangan Sekda Provinsi Kalimantan Timur



Tabel. 3  
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur Dengan dan Tanpa Migas Tahun 1987-2006 (dalam Jutaan Rupiah).

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1983, 1993 dan 2000		Pertumbuhan %	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
1	2	3	4	5	6	7
1986	5,502,060.07	1,873,801.80	5,342,069.13	1,607,775.43		
1987	7,218,440.92	2,467,121.55	5,284,936.90	1,879,103.07	-1.07	16.88
1988	7,927,378.08	3,057,996.89	5,309,166.46	2,071,473.99	0.46	10.24
1989	8,831,385.65	3,765,335.99	5,446,780.35	2,205,970.12	2.59	6.49
1990	10,684,275.00	4,328,901.77	5,814,338.77	2,340,856.80	6.75	6.11
1991	12,227,447.16	5,272,849.60	6,184,735.32	2,511,818.30	6.37	7.30
1992	13,923,599.49	5,609,357.86	6,613,558.94	2,743,205.71	6.93	9.21
1993	16,021,536.65	8,253,079.54	16,021,536.65	8,252,780.37		
1994	18,897,252.03	9,322,951.17	17,535,037.16	8,611,416.68	9.45	4.35
1995	21,619,609.00	11,132,705.23	18,276,580.73	9,705,435.50	4.23	12.70
1996	24,118,256.64	12,445,187.39	19,792,192.52	10,720,157.35	8.29	10.46
1997	27,395,304.86	13,924,671.91	20,672,724.77	11,407,647.86	4.45	6.41
1998	51,505,146.00	22,258,328.00	20,514,643.00	11,090,269.00	-0.76	-2.78
1999	55,866,979.00	24,102,231.00	21,519,669.00	11,584,182.00	4.90	4.45
2000	82,447,053.00	30,220,961.00	82,447,053.00	30,220,961.00		
2001	91,890,495.00	35,911,341.00	86,348,105.00	32,420,025.00	4.73	7.28
2002	93,859,928.00	41,265,226.00	87,850,395.00	34,764,413.00	1.74	7.23
2003	106,453,594.00	46,250,605.00	89,483,542.00	36,586,682.00	1.86	5.24
2004	133,704,073.00	53,606,657.00	91,050,429.00	39,307,435.00	1.75	7.44
2005	176,132,176.00	67,439,735.00	93,735,459.00	42,023,791.00	2.95	6.91
2006	218,560,279.00	81,272,813.00	96,420,528.00	44,740,147.00	2.86	6.46

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah penghasil devisa negara yang cukup besar, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis ekonomi dan melaksanakan program pemulihan dan hasilnya secara perlahan menunjukkan perkembangan ekonomi yang semakin membaik, perkembangan yang nampak nyata diperlihatkan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif seperti terlihat pada tabel 8 dimana pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan baik dengan menggunakan harga konstan tahun 1983, 1993 maupun menggunakan harga konstan tahun 2000 rata-rata menunjukkan angka yang positif meskipun pada tahun 1987 laju pertumbuhan PDRB dengan migas menunjukkan angka -1, 07 persen dan terendah terjadi ketika krisis moneter yang kemudian menjadi krisis ekonomi melanda Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Timur juga terkena dampak dari krisis ekonomi seperti dengan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 1993 dengan Migas pada tahun 1998 sebesar -0, 76 persen dan tanpa Migas sebesar -2, 78 persen. Akan tetapi seiring dengan kondisi Kalimantan Timur yang cenderung membaik, serta kebijakan pemerintah pusat dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi (PDRB atas dasar harga konstan 2000) di Kalimantan Timur selama kurun waktu 2001 sampai dengan 2006, menunjukkan angka yang positif.

Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS ver.15 diperoleh persamaan regresi linear berganda:

$$Y = \ln 24,286 + 0,014i + \ln 0,229G$$

$$Y = 3.525.947.061 i^{0,014} G^{0,229}$$

$$t = (0,796) (7.698)$$

$$R = 0,909$$

$$R^2 = 0,826$$

$$F = 40,231 \text{ dengan sig} = 0,000$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat bunga berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang bersumber dari kontribusi sektor migas yang cenderung padat modal sehingga naik turunnya pertumbuhan tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga sedangkan pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,229 dimana apabila pengeluaran pembangunan naik 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan naik 0,229 persen.

## V. Kesimpulan dan Saran

Tingkat bunga berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Saran yang bisa diberikan dalam penerlitan ini; (1) Pemerintah harus mengurangi ketergantungan terhadap sektor dengan basis eksploitasi SDA (Migas) karena tidak berpengaruh secara langsung terhadap masyarakat. (2) Pengeluaran pembangunan perlu ditingkatkan dengan memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan ekonomi masyarakat seperti jalan dan jembatan.

## Referensi

- Arif, Sritua. 1992. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. UIP. Bukit Tinggi.
- Arsyad, lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Daerah*. BPFE Yogyakarta. Cetakan Pertama.
- Axelrod, Donald. 1995. *Budgeting for Modern Government*. Saint martin's. New York.
- Delerme, Charles D and Robert B Ekelund. 1983. *Macroeconomic*. Business Publications. INC. Texas.
- Deliarnov. 2005. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Rajawali Pres. Jakarta.
- Diamond, J. 1989. *Government Expenditure & Economic Growth: An Empirical IMF Working Paper*. No.89/45. Washington DC: IMF
- Dornbusch, Rudiger and Stanley Fisher. 1997. *Ekonomi Makro*. Terjemahan Sahat Simanora. Rineka Cipta. Jakarta.
- Fabozzi. 1999. *Pasar dan Lembaga Keuangan*. Terjemahan oleh Djakman Buku satu Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.
- Hamsinah. 2006. *Pengaruh Tingkat Bunga, Exchange Rate dan Kapasitas Produksi terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Ekspor dan Investasi Sektor Perkebunan*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana Unhas.

- Haziarah. 2004. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Toli-Toli*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana Unhas.
- Landau, Daniel. 1983. *Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country*. Southern Economic Journal.
- Lim, David. 1983. *Government Expenditure and Economic Growth in Less Developed Countries*. World Development, Vol 11 no. 54.
- Linnemann, Ludger and Andreas Schabert. 2005. *Productive Government Expenditure in Monetary Business Cycle Models*, University of Cologne and University of Amsterdam. (<http://tia-80-98.tinbergen.nl/discussionpapers/05053.pdf>, diakses tanggal 16 Maret 2007).
- Lipsey, E. Richard, dkk. 1995. *Pengantar Makro Ekonomi*. jilid 1. Terjemahan Oleh Jaka. A Wasana, dkk. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Lyn, Square, 1982. *Kebijaksanaan Kesempatan Kerja di Negara-negara Sedang Berkembang*. Publikasi Riset Bank Dunia. Penerbit UI-Pres. Jakarta.